KRISIS MONETER 1997-1998: AKAR PENYEBAB, DAMPAK EKONOMI, DAN KEBIJAKAN PENANGANAN DI INDONESIA**Ardi Sunardi¹, Wilda Nur Afiah², Siti Nuranisya Fadlah³, Eko Ribawati⁴**2288230016@untirta.ac.id¹²³⁴ Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Ciwaru No. 25 Serang, Banten**Abstract**

The monetary crisis that hit Indonesia in 1997-1998 was one of the most lasting economic events in the country's history. The crisis not only affected the financial and economic sectors, but also triggered considerable social and political turmoil. This research aims to find out the causes and impacts of the 1997-1998 monetary crisis to find out the role of the Government, Bank Indonesia, and the IMF in overcoming the crisis. Using a descriptive qualitative research method, the research analysis shows that the monetary crisis in Indonesia was triggered by a combination of internal and external factors. Internally, the Indonesian economy was vulnerable to shocks due to a weak banking system, high foreign debt, and poor corporate governance. Meanwhile, external factors included foreign capital flight from the Southeast Asian region and the weakening of regional currency exchange rates. The crisis triggered a significant depreciation of the rupiah, mass corporate bankruptcies, and rising unemployment and poverty. The government responded by requesting assistance from the IMF and implementing an economic restructuring programme.

Keywords: Monetary Crisis, Economy, IMF

Abstrak

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 merupakan salah satu peristiwa ekonomi yang paling membekas dalam sejarah negara ini. Krisis ini bukan hanya berdampak pada sektor keuangan dan perekonomian, tetapi juga memicu gejolak sosial dan politik yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan dampak krisis moneter tahun 1997-1998 untuk mengetahui peran Pemerintah, Bank Indonesia, dan IMF dalam mengatasi krisis tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis penelitian menunjukkan bahwa krisis moneter di Indonesia dipicu oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Secara internal, perekonomian Indonesia rentan terhadap guncangan karena lemahnya sistem perbankan, tingginya utang luar negeri, dan buruknya tata kelola perusahaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi pelarian modal asing dari kawasan Asia Tenggara dan pelemahan nilai tukar mata uang regional. Krisis ini memicu depresiasi nilai rupiah yang signifikan, kebangkrutan massal perusahaan, serta meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah merespons dengan meminta bantuan dari IMF dan menerapkan program restrukturisasi ekonomi.

Kata Kunci: Krisis moneter, Ekonomi, IMF

PENDAHULUAN

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perekonomian negara ini. Krisis ini bukan hanya berdampak pada sektor keuangan dan perbankan, tetapi juga meluas ke berbagai sektor lainnya seperti sosial, politik, dan keamanan. Periode krisis moneter tersebut dipandang sebagai salah satu masa paling sulit dalam perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan.

Sebelum krisis moneter melanda, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama lebih dari tiga dekade. Pada tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencapai angka 7-8% per tahun (Radelet, 1999). Namun, keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh. Praktik kroni kapitalisme dan korupsi yang merajalela, sistem perbankan yang lemah, serta ketergantungan yang besar pada aliran modal asing menjadi faktor-faktor

yang mempercepat runtuhnya perekonomian Indonesia ketika terjadi gejolak di pasar keuangan regional pada pertengahan 1997 (Djiwandono, 2000).

Krisis moneter di Indonesia bermula dari melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada Juli 1997. Dalam waktu singkat, nilai Rupiah terpuruk hingga mencapai titik terendah di angka Rp 17.000 per Dolar AS pada Januari 1998 (Departemen Keuangan RI, 2000). Pelemahan nilai tukar Rupiah ini memicu gelombang kepanikan di kalangan investor dan pelaku ekonomi, yang kemudian memicu aksi penarikan dana besar-besaran dari sektor perbankan dan pasar modal. Hal ini pada gilirannya menyebabkan terjadinya krisis likuiditas dan krisis kepercayaan yang akut di sektor perbankan dan keuangan.

Untuk mengatasi krisis moneter tersebut, pemerintah Indonesia menempuh sejumlah kebijakan seperti program restrukturisasi perbankan, penutupan sejumlah bank yang tidak sehat, serta menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF). Namun, proses pemulihan ekonomi berjalan lambat dan memakan waktu yang cukup lama.

Dampak krisis moneter ini tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat lainnya. Jumlah pengangguran meningkat tajam dari sekitar 4,7 juta orang pada Agustus 1997 menjadi 8,1 juta orang pada Februari 1999 (Badan Pusat Statistik, 1999). Angka kemiskinan juga melonjak dari 17,7% pada 1996 menjadi 23,5% pada 1999 (World Bank, 2000). Kondisi ini memicu gelombang protes dan kerusuhan sosial di berbagai daerah di Indonesia.

Dari sisi politik, krisis moneter turut memicu tumbangnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto setelah lebih dari tiga dekade berkuasa. Pada Mei 1998, gelombang demonstrasi besar-besaran menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Pergantian kepemimpinan nasional ini menandai dimulainya era Reformasi di Indonesia.

Untuk mengatasi krisis yang berkepanjangan, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie melakukan sejumlah langkah reformasi struktural di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Program rekapitalisasi perbankan dilanjutkan, sejumlah proyek infrastruktur ditunda, dan upaya restrukturisasi utang luar negeri diintensifkan (Departemen Keuangan RI, 2000). Meskipun proses pemulihan berjalan lambat, lambat laun perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda stabilitas.

Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam akar penyebab krisis moneter 1997-1998, dampaknya terhadap berbagai sektor, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode ini mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis suatu objek permasalahan dari sudut pandang penulis berdasarkan hasil telaah pustaka yang menunjang penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan artikel yang berhubungan dengan judul penelitian. Peneliti mengumpulkan data melalui studi literatur (studi kepustakaan) yang berhubungan dengan krisis moneter 1997-1998. Proses menganalisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan membandingkan semua data sehingga dapat menjawab permasalahan. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah terjawab.

PEMBAHASAN

A. Krisis Moneter

Krisis moneter mengacu pada situasi ketidakstabilan ekonomi yang ditandai dengan fluktuasi nilai tukar mata uang suatu negara secara drastis dalam waktu singkat.

Ini merupakan fenomena yang sering terjadi di dunia keuangan global. Krisis moneter terjadi ketika kepercayaan pasar terhadap mata uang suatu negara menurun secara signifikan, menyebabkan permintaan yang tinggi untuk menjual mata uang tersebut dan beralih ke mata uang yang lebih kuat atau *safe-haven* seperti dolar AS.

Ketika mengalami krisis moneter, nilai tukar mata uang suatu negara akan terdepresiasi secara tajam terhadap mata uang negara lain, terutama mata uang cadangan dunia seperti dolar Amerika Serikat. Gejala nilai tukar ini mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang tinggi dan menurunnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian negara tersebut. Kondisi ini kerap disertai dengan meningkatnya permintaan terhadap mata uang asing sebagai *safe haven* investasi.

Krisis moneter juga dicirikan dengan adanya tekanan besar terhadap cadangan devisa suatu negara. Otoritas moneter terpaksa menggunakan cadangan devisanya untuk melakukan intervensi pasar dalam upaya menstabilkan nilai tukar mata uang domestik. Namun, apabila cadangan devisa terus berkurang dan kepercayaan pasar tidak dapat dipulihkan, maka krisis moneter berpotensi memicu krisis ekonomi yang lebih luas dan berkepanjangan.

B. Gambaran Krisis Moneter di Indonesia Tahun 1997-1998

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 merupakan salah satu peristiwa ekonomi paling mengerikan dalam sejarah negara ini. Krisis tersebut bermula dari gejala nilai tukar mata uang di kawasan Asia Tenggara, yang kemudian menyebar ke Indonesia dan memicu kepanikan di pasar keuangan domestik.

Sebelum mengalami guncangan krisis moneter pada akhir dekade 1990-an, Indonesia mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan positif. Pada awal periode tersebut, sekitar tahun 1978, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 4,7%. Kondisi ini memberikan kontribusi yang menguntungkan terhadap pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran dalam struktur perekonomian global dan penurunan harga komoditas, yang mengharuskan Indonesia untuk beradaptasi dan menghadapi tantangan-tantangan baru. Pada bulan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah Rp. 2.432 per dolar AS. Namun, dalam waktu singkat, nilai tukar rupiah merosot drastis hingga menyentuh titik terendah pada Rp. 17.000 per dolar AS pada Juni 1998.

Penyebab utama krisis moneter ini adalah ketidakstabilan sistem keuangan Indonesia pada saat itu. Banyak perusahaan dan konglomerasi yang memiliki utang luar negeri dalam jumlah besar, sementara cadangan devisa negara terbatas. Ketika nilai tukar rupiah anjlok, utang luar negeri ini menjadi membengkak dan sulit untuk dibayar. Hal ini memicu kepanikan di kalangan investor dan menyebabkan penarikan dana besar-besaran dari Indonesia.

Dampak krisis moneter ini sangat luas dan menghancurkan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 1997 masih mencapai 4,7%, pada tahun 1998 berkontraksi menjadi -13,1%. Angka inflasi melonjak dari 6,2% pada tahun 1997 menjadi 77,6% pada tahun 1998. Jumlah pengangguran meningkat drastis, dari 4,7 juta orang pada tahun 1997 menjadi 8,1 juta orang pada tahun 1998. Krisis moneter ini juga memicu gelombang demonstrasi dan kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Kekacauan sosial dan politik semakin memperburuk kondisi ekonomi. Pada bulan Mei 1998, terjadi kerusuhan besar-besaran di Jakarta dan sekitarnya yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan merugikan secara material hingga triliunan rupiah.

Untuk mengatasi krisis moneter ini, pemerintah Indonesia pada saat itu dipaksa untuk menerima program bantuan dari *International Monetary Fund* (IMF). Program ini mensyaratkan dilakukannya reformasi struktural di bidang ekonomi, termasuk penghapusan subsidi BBM, penutupan sejumlah bank, dan restrukturisasi utang.

Meskipun berat, langkah-langkah ini perlahan-lahan mampu menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia.

C. Penyebab Krisis Moneter yang Melanda Indonesia

Krisis mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya salah satu pengertian krisis menurut (Estey, 1960) "krisis merupakan penyimpanan kegiatan ekonomi yang menonjol dan titik awal gerak kegiatan ekonomi yang kondisinya sedang menurun/down-turn atau the upper turning point". Adapun (Teguh, 2009) berpendapat dan mengartikan bahwa krisis merupakan suatu kondisi ekonomi yang sudah mengalami atau dengan kata lain agak resesi (rather than recession) yang dimana sudah mengalami kemerosotan dalam kondisi perekonomian.

Kemudian menurut para ahli ekonomi salah satunya adalah (Nur 2020) mengartikan secara sederhana bahwa krisis bisa terjadi karena harga suatu barang, pangan, dan lain sebagainya yang melonjak sangat tinggi dari harga sebelumnya, sedangkan tidak adanya lagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terlebih khususnya untuk masalah finansial yang dimana masyarakat sudah tidak berkeinginan lagi untuk menyimpan uang di bank.

Krisis 1997-1998 disebabkan oleh terjadinya inflasi yang menjadi tinggi dan rupiah terdepresiasi. Oleh karena itu hal ini dapat terjadi disebabkan dengan adanya penularan pada Negara Indonesia melalui kerjasama antar Negara. Seperti kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Thailand dan Indonesia dengan Amerika. Sedang kala itu, kondisi fundamental ekonomi Indonesia kerap menurun. Sementara menurut Lepi T. Tarmidi dalam artikelnya yang berjudul *Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran* menuliskan bahwa penyebab utama dalam terjadinya krisis yang berkepanjangan ini disebabkan karena terjadinya penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang sangat runcing, adapun faktor lainnya yang berbeda menurut pandangan masing-masing pengamat. Berikut merupakan ringkasan mengenai beberapa faktor-faktor dari pandangan urutan kejadian :

- 1) Dianutnya sistem devisa yang terlalu lapang tanpa adanya pengamatan dan pemeriksaan yang berkelanjutan, hal ini dapat memungkinkan terjadinya arus dan valas bergerak keluar-masuk dengan secara tidak beraturan jumlahnya. Hal seperti ini bisa terjadi karena Indonesia mempercayai rezim devisa yang lapang dengan rupiah yang konvertibel, kemudian sampai membuka kesempatan yang besar untuk orang bermain dipasar valas. Masyarakat memiliki kebebasan dalam membuka rekening valas di dalam negeri atau di luar negeri. Valas bebas dalam diperjualkan di dalam negeri, sehingga rupiah pun bebas dalam diperjualkan pada pusat-pusat keuangan yang berada di luar negeri
- 2) Tingkat depresiasi rupiah yang sangat rendah, diperkirakan sekitar 2,4% (1993) sampai 5,8% (1991) antara tahun 1998 sampai 1996, yang berada di bawah nilai tukar nyatanya, mengakibatkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued. Dengan ditambahkan kenaikan pendapatan penduduk dalam nilai US dollar yang kenaikannya relatif sangat cepat dari kenaikan pendapatan pada Rupiah, kemudian produk yang berada di dalam negeri yang semakin lama semakin terkalahkan dengan produk impor. Nilai Rupiah yang overvalued berarti juga proteksi industri yang negatif. Maka dampaknya harga barang impor menjadi lebih murah dan produk dalam negeri menjadi lebih mahal, sampai masyarakat pun lebih memilih barang impor yang mempunyai kualitas lebih baik. Akhirnya produksi yang berada di dalam negeri tidak berkembang, sehingga ekspor menjadi kurang kompetitif dan impor menjadi meningkat.
- 3) Akar dari semua permasalahan yaitu utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah kemudian nilai tukar rupiah mendapatkan tekanan yang berat disebabkan karena tidak cukup tersedianya devisa untuk membayar utang yang telah jatuh tempo termasuk dengan bunganya (bandingkan juga Wessel et al.: 22),

dan juga ditambahkan sistem perbankan nasional yang lemah. Akumulasi utang swasta luar negeri yang sejak awal tahun 1990-an sudah mencapai jumlahnya yang cukup besar, bahkan sampai sudah jauh melampaui utang resmi pemerintah yang beberapa tahun terakhir justru lebih berkurang (*oustanding official debt*).

D. Dampak Krisis Moneter

Para ahli ekonomi sepakat bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 disebabkan oleh penularan dari Thailand yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan makro. Tiga faktor utama yang diperhatikan yaitu: fundamental makro ekonomi, kapitalisme dan kepanikan serta penularan kebijakan di Asia Timur yang termasuk di dalamnya Indonesia. (Putri Kuemala Sari dan Fakhruddin, 2016)

Indonesia yang ikut tertular krisis tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok. Diikuti dengan utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang sangat besar sehingga menyebabkan sektor luar negeri terutama nilai tukar dollar AS mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai aslinya. Selain itu, serbuan mendadak dan secara terus menerus terhadap dollar AS (spekulasi) dan tenggat waktu utang swasta luar negeri dalam jumlah besar menyebabkan krisis ini berkepanjangan. Krisis ini dipersulit lagi dengan adanya akumulasi dari berbagai faktor penyebab lainnya yang datang dari berbagai sektor. (Lepi T Tarmidi, 1999) adapun dampak Krisis moneter terhadap beberapa bidang antara lain:

Bidang Ekonomi

1. Penurunan nilai mata uang:
Ketika terjadi krisis moneter, kepercayaan terhadap mata uang lokal menurun. Ini menyebabkan depresiasi yang cepat terhadap mata uang asing, terutama mata uang kuat seperti dolar AS atau euro. Akibatnya, diperlukan lebih banyak mata uang lokal untuk membeli barang atau jasa dari luar negeri.
2. Inflasi tinggi:
Penurunan nilai mata uang menyebabkan harga barang impor meningkat. Ini memicu kenaikan harga barang dan jasa secara umum di dalam negeri. Inflasi tinggi mengurangi daya beli masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas.
3. Kontraksi ekonomi:
Ketidakpastian dan kesulitan ekonomi menyebabkan penurunan konsumsi, investasi, dan produksi. Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lambat atau bahkan negatif (resesi). PDB negara dapat mengalami penurunan signifikan.
4. Pengangguran meningkat:
Saat perusahaan menghadapi penurunan permintaan dan peningkatan biaya produksi, mereka sering merespons dengan mengurangi tenaga kerja. Ini menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran, yang dapat memiliki dampak sosial yang luas.
5. Krisis perbankan:
Bank-bank menghadapi peningkatan kredit macet karena nasabah kesulitan membayar pinjaman. Selain itu, bank juga dapat mengalami krisis likuiditas jika terjadi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah (bank run). Hal ini dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
6. Penurunan investasi:
Investor, baik domestik maupun asing, cenderung menarik dana mereka dari negara yang mengalami krisis moneter karena risiko yang meningkat. Ini mengurangi modal yang tersedia untuk bisnis dan pembangunan infrastruktur.
7. Defisit neraca perdagangan:
Impor menjadi lebih mahal karena penurunan nilai mata uang, sementara ekspor menjadi kurang kompetitif karena inflasi domestik. Ini dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan yang lebih besar.
8. Utang luar negeri membengkak:

Jika suatu negara memiliki utang dalam mata uang asing, nilai utang tersebut dalam mata uang lokal akan meningkat drastis saat terjadi depresiasi. Ini dapat menyulitkan pemerintah dan perusahaan dalam membayar utang mereka.

9. Penurunan daya beli masyarakat:

Inflasi yang tinggi menyebabkan nilai riil dari pendapatan dan tabungan masyarakat menurun. Akibatnya, standar hidup masyarakat dapat menurun secara signifikan.

10. Ketidakstabilan pasar keuangan:

Pasar saham dan obligasi sering mengalami volatilitas tinggi selama krisis moneter. Harga saham dapat jatuh tajam, sementara yield obligasi meningkat karena peningkatan risiko. Ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor dan mengurangi kepercayaan terhadap pasar keuangan.

Bidang Politik

1) Ketidakstabilan pemerintahan:

Krisis moneter sering menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang berkuasa. Masyarakat cenderung menyalahkan pemerintah atas kesulitan ekonomi yang mereka alami. Ini dapat menyebabkan demonstrasi besar-besaran, mogok umum, atau bentuk protes lainnya. Dalam kasus ekstrem, dapat terjadi kudeta atau revolusi. Bahkan dalam sistem demokrasi, krisis dapat menyebabkan pemilu dini atau pergantian pemerintahan yang tidak terduga.

2) Peningkatan popularitas oposisi:

Saat pemerintah yang berkuasa terlihat gagal menangani krisis, partai-partai oposisi dan tokoh-tokoh politik alternatif sering mendapat dukungan lebih besar. Mereka dapat menawarkan visi dan solusi alternatif yang menarik bagi masyarakat yang frustrasi. Ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan politik dan mempengaruhi hasil pemilihan umum berikutnya.

3) Munculnya populisme:

Krisis ekonomi menciptakan kondisi yang kondusif bagi munculnya pemimpin populis. Mereka sering menawarkan solusi sederhana untuk masalah kompleks, misalnya menyalahkan elit atau kelompok minoritas atas krisis. Pemimpin populis dapat memanfaatkan kemarahan dan frustrasi publik untuk mendapatkan dukungan, yang dapat mengubah lanskap politik secara signifikan.

4) Pergeseran kebijakan:

Pemerintah mungkin terpaksa mengadopsi kebijakan yang sebelumnya dianggap tidak populer atau tidak mungkin. Misalnya, pemerintah yang sebelumnya mendukung pasar bebas mungkin harus menerapkan kontrol modal atau nasionalisasi bank. Pergeseran kebijakan ini dapat memiliki implikasi jangka panjang pada orientasi politik negara.

5) Tekanan internasional:

Negara yang mengalami krisis moneter sering membutuhkan bantuan dari lembaga internasional seperti IMF atau Bank Dunia. Bantuan ini biasanya datang dengan syarat-syarat tertentu, seperti pengetatan anggaran atau reformasi struktural. Syarat-syarat ini dapat membatasi otonomi politik pemerintah dan mempengaruhi kebijakan domestik, yang kadang-kadang menimbulkan kontroversi.

6) Polarisasi politik:

Krisis dapat mempertajam perbedaan ideologis antara berbagai kelompok politik. Perdebatan tentang cara terbaik untuk menangani krisis dapat menjadi sangat intens dan membagi masyarakat. Ini dapat menyebabkan polarisasi yang lebih besar dalam masyarakat dan sistem politik, mempersulit konsensus dan kompromis.

7) Peningkatan nasionalisme ekonomi:

Sebagai respons terhadap krisis, beberapa politisi mungkin mengadvokasi kebijakan yang lebih proteksionis atau isolasionis. Mereka mungkin menyalahkan globalisasi atau negara asing atas masalah ekonomi dan mendorong kebijakan "ekonomi nasional". Ini dapat mempengaruhi hubungan internasional dan kebijakan perdagangan.

- 8) Perubahan aliansi politik:
Krisis dapat mengubah dinamika antara partai-partai politik. Partai-partai yang sebelumnya berseberangan mungkin membentuk koalisi untuk menangani krisis, sementara aliansi lama mungkin pecah karena perbedaan pendapat tentang cara menangani situasi. Ini dapat mengubah struktur sistem partai dan dinamika politik secara keseluruhan.
- 9) Reformasi sistem:
Krisis yang parah dapat mendorong reformasi sistem politik atau ekonomi yang lebih luas. Misalnya, krisis mungkin mengarah pada perubahan konstitusi, reformasi sistem pemilu, atau perubahan fundamental dalam struktur ekonomi negara. Reformasi semacam ini dapat memiliki dampak jangka panjang pada sistem politik negara.
- 10) Meningkatkan peran militer:
Dalam situasi ekstrem, krisis moneter dapat menyebabkan kekacauan sosial yang memicu intervensi militer dalam politik. Militer mungkin mengambil alih pemerintahan dengan alasan menjaga stabilitas, atau pemerintah sipil mungkin lebih mengandalkan militer untuk menjaga ketertiban. Ini dapat mengancam demokrasi dan menyebabkan periode pemerintahan otoriter.

Bidang Sosial

- 1) Peningkatan kemiskinan:
Inflasi tinggi dan pengangguran menyebabkan lebih banyak orang jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pendapatan riil menurun, sementara biaya hidup meningkat, membuat kebutuhan dasar sulit terpenuhi bagi banyak keluarga.
- 2) Kesenjangan sosial melebar:
Krisis sering memperburuk ketimpangan ekonomi. Kelompok berpenghasilan rendah dan menengah cenderung lebih terpukul, sementara sebagian kecil orang kaya mungkin dapat melindungi atau bahkan meningkatkan kekayaan mereka.
- 3) Penurunan kualitas pendidikan:
Anggaran pendidikan mungkin dikurangi, dan banyak keluarga kesulitan membayar biaya sekolah. Ini dapat menyebabkan peningkatan angka putus sekolah dan penurunan kualitas pendidikan secara umum.
- 4) Masalah kesehatan masyarakat:
Akses ke layanan kesehatan dapat menurun karena pengurangan anggaran pemerintah dan ketidakmampuan individu membayar perawatan. Stress akibat krisis juga dapat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat.
- 5) Peningkatan kejahatan:
Kesulitan ekonomi dapat mendorong peningkatan tingkat kejahatan, terutama kejahatan properti dan penipuan.
- 6) Perubahan struktur keluarga:
Tekanan ekonomi dapat menyebabkan peningkatan angka perceraian, penundaan pernikahan, atau penurunan angka kelahiran.
- 7) Migrasi dan perpindahan penduduk:
Orang mungkin berpindah mencari pekerjaan, baik di dalam negeri (urbanisasi) maupun ke luar negeri, mengubah demografi dan dinamika sosial.
- 8) Ketegangan sosial dan konflik:
Frustrasi ekonomi dapat meningkatkan ketegangan antar kelompok dalam masyarakat, kadang-kadang mengarah pada konflik sosial atau etnis.
- 9) Perubahan nilai sosial:
Krisis dapat mengubah prioritas dan nilai-nilai masyarakat, misalnya meningkatkan materialisme atau sebaliknya mendorong solidaritas komunitas.
- 10) Dampak pada generasi muda:
Pengangguran tinggi di kalangan pemuda dapat menyebabkan "generasi yang hilang", dengan dampak jangka panjang pada karir dan prospek hidup mereka.

- 11) Peningkatan ketergantungan pada jaringan sosial:
Keluarga dan komunitas mungkin harus lebih mengandalkan satu sama lain untuk dukungan, memperkuat beberapa ikatan sosial.
- 12) Perubahan pola konsumsi:
Masyarakat mungkin beralih ke barang dan jasa yang lebih murah, mempengaruhi gaya hidup dan industri tertentu.

Dampak-dampak ini saling terkait dan dapat memiliki efek jangka panjang pada struktur dan dinamika sosial masyarakat. Pemulihan dari dampak sosial krisis moneter seringkali membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pemulihan ekonomi.

E. Kebijakan dalam mengatasi Krisis Moneter

Kebijakan Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah mempunyai kebijakan yaitu berupaya dengan melakukan tindakan untuk mengurangi dampak akibat terjadinya ekonomi global terutama bagi kepentingan masyarakat bawah. Daya beli masyarakat menurun akibatnya terjadinya kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok membuat pemerintah dalam mengubah besaran subsidi BBM, listrik serta kebutuhan pokok untuk dapat meringankan beban masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dilakukan dengan merelokasi anggaran APBN yaitu dengan menggeser pembiayaan sektor-sektor lain.

Kemudian pada sisi lain upaya yang dilakukan pemerintah dalam kenaikan harga pangan yang disebabkan karena perubahan iklim, pertambahan populasi kenaikan harga bahan bakar yaitu petani melakukan adaptasi terhadap kenaikan harga/permintaan yang diikuti dengan keringanan dan kemudahan dalam mendapatkan kredit, bantuan bibit, ternak dan keterampilan untuk meningkatkan hasil pertanian. menurut (Sihono, 2008) hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan persediaan dan kestabilan harga.

Kebijakan Luar Negeri (IMF & World Bank)

Menurut pandangan IMF, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia bisa berkepanjangan karena pemerintah baru meminta bantuan IMF setelah nilai tukar rupiah sangat terdepresiasi. IMF fokus pada strategi untuk mengembalikan kepercayaan pada mata uang yaitu dengan membuat mata uang tersebut menarik. Artinya program pemulihan ekonomi ini mengutamakan restrukturisasi sektor finansial. Program bantuan IMF pertama ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 1997 yang mencakup pada empat bidang: (Lepi T Tarmidi, 1999)

- 1) Penyembuhan sektor keuangan
- 2) Kebijakan fiskal
- 3) Kebijakan moneter
- 4) Penyesuaian structural

Untuk mendorong program ini, IMF mengalokasikan dana hingga 4,3 Milyar dollar AS yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, World Bank, Bank Pembangunan Asia dan negara-negara sahabat juga menjanjikan pemberian bantuan yang nilai totalnya mencapai kurang lebih 37 Milyar dollar AS. Namun bantuan dari pihak selain IMF berhubungan dengan kesungguhan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program-program yang diajukan IMF.

Indonesia sendiri merasa berat dengan beberapa program IMF yang tidak mungkin dilaksanakan, maka dilakukanlah negosiasi kedua yang mengeluarkan persetujuan baru terkait reformasi ekonomi dan ditandatangani pada tanggal 15 Januari 1998. Diharapkan saran-saran IMF dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menstabilkan nilai kurs rupiah. Beberapa program pokok dari IMF sebagai berikut. (Lepi T Tarmidi, 1999)

- a. Kebijakan makro ekonomi
 - Kebijakan fiskal
 - Nilai tukar

- kebijakan moneter
- b. Restrukturisasi sektor keuangan
 - Program restrukturisasi bank
 - Memperkuat aspek hukum dan pengawasan perbankan
- c. Reformasi structural
 - Perdagangan luar negeri dan investasi
 - Deregulasi dan swastanisasi
 - Social safety net
 - Lingkungan hidup

Pelaksanaan reformasi kedua inipun mengalami hambatan sehingga diadakan negosiasi ulang yang menciptakan supplementary memorandum pada tanggal 10 April 1998. Fokusnya lebih luas daripada persetujuan kedua dan aspek baru yang masuk adalah penyelesaian utang luar negeri swasta Indonesia. Beberapa strategi yang direncanakan antara lain: (Lepi T Tarmidi, 1999)

- a. Memperkuat dan mempercepat restrukturisasi sistem perbankan.
- b. Menstabilkan nilai rupiah pada tingkat yang sesuai.
- c. Menyusun kerangka untuk mengatasi masalah utang Perusahaan swasta.
- d. Mengembalikan pembelanjaan pada keadaan normal sehingga kegiatan

ekspor

dapat bangkit.

- e. Memperkuat implementasi reformasi structural untuk membangun ekonomi yang efisien dan kompetitif.

IMF memprioritaskan program restrukturisasi sektor perbankan. Pemerintah Indonesia akan menjamin kelancaran kredit murah bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dengan tambahan anggaran dari pemerintah. (Lepi T Tarmidi, 1999)

Kebijakan Bank Indonesia

Kondisi perekonomian saat terjadi krisis 1997-1998 mendorong pemerintah untuk memberikan respons agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Respons kebijakan yang diambil pertama kali adalah kebijakan terpadu mencakup kebijakan moneter, fiskal dan sektoral. Secara umum, pemerintah memperketat kebijakan moneter dan mengurangi ekspansi pengeluaran pemerintah pada sektor kebijakan fiskal.

Dari sisi kebijakan moneter, pemerintah menetapkan intervensi baik secara spot maupun secara forward serta meningkatkan fleksibilitas nilai tukar rupiah melalui pelebaran cakupan intervensi nilai tukar menjadi 12% dan diakhiri dengan penghapusan cakupan intervensi pada 14 Agustus 1997. Bank Indonesia juga menghentikan pembelian SPBU perbankan sejak tanggal 24 Juli 1997 diikuti dengan fasilitas diskonto I dan SBI Repo juga dihentikan. Kebijakan tersebut belum cukup sehingga Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI intervensi untuk seluruh jangka waktu yang mencapai 30% dalam 1 bulan. Akibatnya, suku bunga overnight di pasar uang antar bank pernah mencapai 159%.

Likuiditas yang semakin ketat dan menghindari kemungkinan memperburuk situasi perekonomian, Bank Indonesia menurunkan diskonto SBI intervensi. Selain itu, dilakukan juga pencairan lebih awal SBI milik BUMN, Yayasan dan lembaga lainnya serta pelonggaran pemberian kredit likuiditas terkhusus untuk program pengembangan usaha kecil. Langkah-langkah alternatif untuk meredam perubahan nilai tukar dilakukan upaya peningkatan pasokan devisa dan melihat kebutuhan devisa pihak swasta. Beberapa langkah yang digunakan yaitu kebijakan swap khusus untuk eksportir dan forward kepada importir, penurunan giro wajib minimum, penanggungan rencana pinjaman komersial dan penyediaan kembali fasilitas SPBU kepada perbankan. Pembentukan INDRA dan Jakarta inisiatif juga dilakukan untuk mengurangi tekanan valuta asing dan mempercepat penyelesaian utang swasta.

Di sektor keuangan riil, langkah atau kebijakan yang diambil ialah membentuk Badan Penyetahari Perbankan Nasional, proses privatisasi BUMN dipercepat, mengurangi wewenang distribusi Badan Urusan Logistik hanya untuk beras dan menghapus hak monopoli berbagai komoditi seperti cengkeh, semen, kertas dan kayu. (Charles PR Joseph, 1999).

KESIMPULAN

Krisis moneter 1997-1998 dimulai dari adanya kebijakan pemerintah Thailand yang melakukan devaluasi terhadap mata uang negara tersebut yaitu Bath. Akibatnya nilai rupiah yang berada pada nilai Rp. 2.600 mencapai hingga Rp. 14.900 terhadap dollar AS. Diikuti dengan utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang sangat besar sehingga menyebabkan sektor luar negeri terutama nilai tukar dollar AS mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai aslinya. Respon kebijakan yang diambil pemerintah pertama kali adalah kebijakan terpadu mencakup kebijakan moneter, fiscal dan sectoral. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dikarenakan pemerintah baru meminta bantuan IMF setelah nilai tukar rupiah sangat terdepresiasi. IMF fokus pada strategi untuk mengembalikan kepercayaan pada mata uang rupiah dan memprioritaskan program restrukturisasi sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Radelet, S. (1999). Indonesia: Long Road to Recovery. Harvard Institute for International Development.
- Djiwandono, J.S. (2000). Krisis dan Restrukturisasi Ekonomi Indonesia. LPFE-UI.
- Sari, Putri Keumala, dkk. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia : Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM). Vol.1 No.2 November : 377-388
- Tarmidi, Lepi T. (1999). Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran.
- Ratna, dkk. (2023) Analisis Penyebab dan Upaya Krisis Moneter yang Dilakukan Para Pemerintah Saat Krisis Global Tahun 2008. Journal Of Economic Education. Vol.2 No.1
- Nirmaya, D.N, dkk. (2020). Pengaruh Krisis Moneter, Nilai Tukar dan Infansi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia. Vol.2 No.1 Oktober : 129-141
- Departemen Keuangan RI. (2000). Laporan Kebijakan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Estey, J. A. (1960). Business Cycles: Their Nature, Cause, and Control. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Teguh, M. (2009). Ekonomi Industri. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (1999). Data Pengangguran Indonesia 1997-1999. Jakarta: BPS.
- World Bank. (2000). Indonesia: Poverty Report. Washington, D.C.: World Bank.